

ANALISIS STRATIFIKASI SOSIAL SEBAGAI SUMBER KONFLIK ANTAR ETNIK DI KALIMANTAN BARAT

Mohammad Ali Al Humaidy

(Penulis adalah dosen tetap pada Jurusan Syari'ah STAIN Pamekasan dan Alumni program Magister Ilmu Sosiologi di Universitas Indonesia Jakarta)

Abstrak:

Secara sederhana, tulisan ini akan menganalisa penyebab atau sumber terjadinya konflik antar etnik di Kalimantan Barat, yang terfokus kepada tingkatan stratifikasi sosial. Penulis berasumsi bahwa perbedaan stratifikasi sosial yang kemudian terbentuk sistem pranata sosial (*The System of Class Stratifications*) mempunyai dampak sosial (konflik antar etnis). Pranata sosial dalam aspek ideologi, agama, ekonomi, politik, bahasa, pendidikan, budaya dan norma-norma sosial lainnya, secara teoritik akan menimbulkan gesekan sosial dan pandangan stereotype etnik yang rentan muncul benih-benih konflik bila dalam realitas sosial menampilkan sifat egois dan fanatisme yang nilai-nilai etnisitas. Benih-benih konflik bersifat laten, apalagi bila ditopang dengan harapan untuk menguasai dan mempertahankan power-privilege-prestige. Disinilah timbul pergolakan sosial antara masyarakat "pribumi" dengan pendatang ataupun sesama etnis. Demikian pula munculnya pertentangan antara kelompok yang ingin menguasai dan mempertahankan power-privilege-prestige dengan kelompok yang ingin merebutnya. Bagi penulis ini sebuah ironi yang perlu kita kaji dan mencari alternatif pemecahan. Ini penting karena menyangkut hak usaha dan hidup manusia yang bagian dari hak asasi manusia, sehingga dengan kejadian konflik etnik di bumi nusantara ini, muncul resolusi konflik sebagai usaha untuk membangun masyarakat pluralis tanpa kekerasan. Alhasil, sebagai masyarakat akademisi mempunyai amanat untuk memberikan sumbangsih pemikiran agar konflik yang bermuansa SARA dapat dikurangi atau bahkan mungkin ditiadakan. Sebuah tantangan untuk mengkaji teori sosiologi khususnya teori (korelasi) stratifikasi sosial dengan konflik sosial.

Kata kunci:

stratifikasi sosial, etnik, madura, dayak

Pendahuluan

Perbicangan tentang konflik etnis dalam perpolitikan nasional kembali aktual untuk dibicarakan. Pertikaian etnis Kalimantan Barat (Sambas, Sampit), Maluku, Poso dan daerah lain yang telah banyak menelan korban harta dan jiwa, mengingatkan kita pada peristiwa kaum jahiliyah, dimana telah terjadi pembunuhan antar manusia. Nyawa manusia seakan tak bernilai akibat egoisme dan kepentingan kelompok. Dalam konteks kekinian, di Indonesia telah muncul budaya komunalisme dan kanibalisme. Sungguh

suatu peradaban yang memilukan dikala Indonesia memasuki era reformasi dan *image* sebagai manusia yang beragama dan beradab.

Fenomena diatas, muncul pertanyaan dan analisis berbagai perspektif (ideologi, politik, sosial, budaya dan ekonomi) tentang penyebab terjadinya konflik etnik. Dalam perspektif politik, muncul anggapan bahwa terjadinya konflik itu akibat permainan elit politik sebagai upaya untuk men-delegitimasi pemerintahan pasca tumbanganya rezim Orde baru, dengan kata lain berkobarnya berbagai konflik dan kerusuhan sosial yang terjadi di Indonesia belakangan ini, disinyalir masih berkaitan dengan runtuhnya rezim Orde Baru pada tanggal 21 Mei 1998. Pada masa rezim Soeharto hampir semua bentuk gejolak sosial bisa diredam dengan kekuatan militer (refresif), teror dan bentuk intimidasi lainnya yang dalam perspektif apapun sikap politik diatas bertentangan dengan hak-hak asasi manusia (HAM). Akibatnya fatal yaitu pemerintah gagal membangun konsolidasi demokrasi dan ketidakadilan sehingga mengakibatkan luka yang dalam di hati rakyat atau konflik (etnik) ini memang terjadi murni antar etnis karena faktor ekonomi, politik, kecemburuan sosial dan faktor lain.

Hal senada dikemukakan oleh beberapa LSM/ NGO pada tanggal 1 Maret 2001 di Jakarta menyatakan bahwa pembantaian yang terjadi tidak bisa disederhanakan sebagai konflik antara orang Dayak dengan Madura, apalagi sebagai konflik agama. Tapi akar dari masalah ini sudah lama tercipta ketika pemerintahan Orde Baru, yang didukung oleh lembaga-lembaga hutang internasional, secara bersama-sama menanam modal di proyek-proyek besar, yang juga menanam akar dari konflik yang terjadi sekarang ini

dan juga menggambarkan situasi kemanusiaan di Indonesia secara umum”¹

Kecenderungan negara yang hegemonik, refresif dan berbagai macam amputasi kepada rakyat, maka pada kondisi dan saat tertentu rakyat akan jenuh dan membangkitkan perlawanan. Perlawanan rakyat terhadap penguasa dapat diwujudkan dalam dua bentuk ; *pertama*, melakukan perlawanan terhadap pemerintah atau penguasa, melalui gerakan sparatis atau pembangkangan terhadap kebijakan negara. *Kedua*, melakukan tindakan hukum yang tidak prosedural dan melanggar norma-norma hukum negara seperti menghakimi sendiri para pelanggar hukum norma sosial dalam masyarakat karena perangkat hukum yang ada tidak lagi mendapatkan legitimasi dari masyarakat².

Dengan demikian apakah konflik sosial (etnik maupun bentuk kerusuhan lain) bagian dari perlawanan terhadap negara atau konflik antar kelompok? Secara teoritik, kerusuhan-kerusuhan yang melanda kita dapat dikategorikan menjadi dua. *Pertama*, kerusuhan kolektif yang terjadi akibat dari munculnya *ke-aku-an* (SARA) suatu kelompok pada kelompok lain. Kerusuhan di Banyuwangi, Tasikmalaya, Ambon, Medan, Kendal, Matraman, Berland dan Wamena, serta perkelahian antar pelajar adalah tipikal kerusuhan massa *vis a vis*.

Kedua, adalah kerusuhan kolektif yang terjadi akibat *state crime* (kejahatan negara) pada masyarakat sipil. Sebuah kerusuhan karena perlawanan massa *vis a vis* negara, seperti kerusuhan di Lampung, Aceh, Timor-timur, Tanjung Priok dan Irian Jaya adalah kerusuhan bertipikal

¹ Dibalik Kerusuhan di Kalimantan Tengah, tanggal Down to Earth N.r. 49, Mei 2001 <http://dte.gn.apc.org/49IKl.htm>

² Jamal Bake, Muhammad Abas, Rinusu, *Nedritas yang semu* (Mengungkap Keberadaan Aparat Keamanan dalam Berbagai Konflik Etnik di Indonesia), PSPK, Jakarta, hal 48.

(disebabkan) *state crime*³. Disini penulis melihat militer sebagaimana diatas memunyai peran besar dalam konflik etnis, sehingga ada pengaruh tersendiri terhadap kelompok/ SARA itu.

Setiap fenomena sosial politik merupakan produk sejarah dan tidak terlepas dari latar belakang sejarahnya (ahistory). Ini berlaku pada fenomena konflik di Kalbar. Sejak tahun 1960-an di Kalbar telah terjadi sembilan kali konflik yang cukup besar. Delapan kali di antaranya adalah konflik antara pendatang baru Madura dengan warga Dayak, dan hanya satu kali dengan Melayu -- Melayu Sambas. Selama delapan kali konflik antara Madura Kalbar dengan Dayak, tak seorang pun dan tak sekali pun Melayu Kalbar bergabung dengan saudaranya, Dayak, memberikan reaksi terhadap Madura Kalbar, walaupun mereka memiliki pengalaman pahit yang sama dalam berhubungan dengan pendatang baru Madura⁴.

Namun demikian, harus diakui pula bahwa banyak faktor yang dapat menjadi pemicu konflik etnik (konflik horisontal) seperti di Sambas dan Sampit, diantaranya dampak dari keterusukan atas harga diri penduduk lokal, keterbelakangan ekonomi, "keterasingan" masyarakat lokal di daerah

sendiri akibat pengaruh dan dominasi pendatang dalam bidang ekonomi, penguasaan tanah, pendatang kurang menghormati adat setempat, politik, birokrasi dan pengembangan agama. Konflik etnik yang sampai saat ini belum juga ada titik temu, mulai dari penyebab utama dan solusi sebagai upaya untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan, kebersamaan dan solidaritas kemanusiaan. Upaya rekonsiliasi yang terinisiatif dari kedua belah pihak ataupun pemerintah yang menjadi fasilitator (baca : penengah) sampai saat belum mampu meredam konflik tersebut.

Berdasarkan kajian Elsam⁵ (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) bahwa hampir semua tokoh masyarakat adat Dayak, dan para akademisi Dayak memiliki analisis dan argumentasi yang sama tentang akar penyebab konflik etnis yang terjadi, yakni ketidakadilan hampir di semua aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, dan hukum yang dialami penduduk asli Dayak, sehingga mereka termarginalisasi sedemikian rupa. Terlepas dari akar persoalannya, tapi yang jelas rangkaian konflik tersebut telah mendatangkan penderitaan bagi para korbannya. Bahwa diabaikannya hak-hak penduduk asli, ternyata ketika bereskalasi menjadi kekerasan sebagai manifes untuk mengembalikan hak-hak itu, justru mendatangkan akibat yang sama parahnya, pelanggaran HAM atas masyarakat pendatang.

Kajian Teoritis

Secara teoritik, kajian ini berangkat dari konsep-konsep dasar tentang teori konflik. Dalam teori konflik, penulis menggunakan analisa Dahrendorf yang berpendapat bahwa kekuasaan dan

³ Pada kerusuhan pertama modus operandinya dapat ditengarai dengan delapan ciri: [1] kerusuhan berada pada wilayah tertentu. [2] para pelaku (yang tidak berubah) [3] dimulai dengan picu awal yang sangat beragam [4]. berlangsung secara simultan dan terus menerus bahkan turun menurun [5]. ada simbolisasi dan ideologi tertentu yang dilibatkan [6]. lokal dan particular [7] muncul secara spontan dan sporadis [8] cenderung beringas, fandalistik, dan destruktif. Sedangkan pada kerusuhan kedua penyebabnya lima hal ; [1]. karena proses militerisasi yang terus menerus [2]. proses ketidak seimbangan hubungan pusat daerah [3]. adanya ketimpangan-kesenjangan sosial di masyarakat. [4]. munculnya rasa kesukuan yang mendalam [5]. perasaan frustrasi dan putus aasa yang berkepanjangan. Baca : M. Yudie R. Haryono, *Neo Tribalisme*, Kompas-jakarta, 23 November 2000, hal. 30.

⁴ Konflik Etnis di Sambas, Suatu Reaksi yang berlebihan, Republika, 31 Maret 1999.

⁵Kalimantan: Konflik Etnis Tak Kunjung Usai. Silahkan baca di http://www.elsam.or.id/txt/asasi/2001_0304/02.html

wewenang merupakan sumber daya yang langka terhadap terjadinya pertikaian, sehingga menjadi sumber utama terjadinya konflik dan perubahan pada pola-pola yang telah melembaga, antara yang berkuasa dan yang dikuasai, dimana peranan yang berkuasa mempunyai kepentingan untuk mempertahankan keadaan dan yang dikuasai berkepentingan untuk membagi kembali kekuasaan atau wewenang.⁶

Sisi lain, dalam menganalisa konflik dari sisi hubungan sosial antara individu-individu, terlihat hubungan yang terjadi secara simultan, yaitu konsensus dan konflik. Kedua kondisi ini merupakan suatu yang ilmiah sifatnya (natural) di dalam berbagai hubungan sosial. Simmel berpendapat: "*Social life involved harmony and conflict, attraction, and repulsion, love and hatred*"⁷. Seorang tokoh Amitai Etzioni membenarkan juga dimana ia mengatakan: "*Some conflict is foundation for whatever harmony exist*"⁸.

Sekalipun ada anggapan bahwa sulit untuk merumuskan konflik, bagi Lewis A. Coser, konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan yang berkenaan dengan status, kekuasaan, sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang berselisih tidak hanya bermaksud memperoleh barang-barang yang diinginkan, melainkan ingin memojokkan, merugikan dan menghancurkan lawan mereka⁹.

Konflik dan masyarakat punya fungsi tersendiri. Fungsi konflik dalam masyarakat

seperti dianalisis oleh Lewis A. Coser¹⁰ tidak harus merusakkan atau bersifat disfungsional untuk sistem dimana konflik itu terjadi, melainkan bahwa konflik itu dapat mempunyai konsekuensi-konsekuensi positif atau menguntungkan sistem itu dengan kata lain konflik berfungsi sebagai stimulus untuk integrasi antar kelompok.

Dari paparan diatas, secara normatif bermakna bahwa konflik sosial sebuah keniscayaan dalam masyarakat yang dilatarbelakangi oleh pertarungan atau perbedaan kepentingan antara pihak *superdinar* (penguasa) yang senantiasa berusaha untuk mempertahankan kekuasaan (*status quo*) bahkan memperbesar kekuasaan. Sedangkan pihak *subdinar* (yang dikuasai) berkeinginan untuk mendapatkan kekuasaan (pemerataan kekuasaan dan retribusi kekuasaan).

Demikian juga yang terjadi di Kalimantan bahwa terjadinya konflik terbuka antara penduduk lokal yang telah berjuang untuk menampilkan diri sebagai kelompok yang harus menjadi "raja dinegeri sendiri" dengan penduduk pendatang yang juga berjuang untuk mencari nafkah (masa depan). Disinilah awal munculnya konflik etnik ketika para penduduk lokal merasa terusik (tidak ikhlas) setelah mengamati para pendatang mampu *survive* atau menguasai khususnya disektor ekonomi.

Munculnya kekerasan terhadap etnis lain tidak semata-mata faktor ekonomi namun juga kemungkinan tidak didahului dengan proses panjang perkembangan kedua elemen tersebut. Oleh karena itu, kekerasan di Sambas dan Sampit bisa ditafsirkan sebagai *politically constructed*

⁶ Prof.Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA dan Ratih Lestari,SH. *Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan Sosiologi*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. 1998) hal.78.

⁷ Harold M. Hodges, *Conflict and Consensus*, New York, The Macmillan, The Macmillan Co, 1971,hal.9

⁸ Ibid, hal. 13

⁹ K.J. Veeger, *The Structure of Sociological Theory*, (Illionis, The Dorsey, 1978), hal 82.

¹⁰ Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict* (Glence, I 11: Free Press, 1956) seperti yang dikutip pada Doyle Paul Johnson *Teori Sosiologi Klasik dan Modern 2*, terj. Robert M.Z. Lawang, (Gremedia, Jakarta : 1986), hal. 195.

*ethnic violence*¹¹ Miskinnya dialog antar etnik, paguyuban antar komunitas etnis, pendidikan yang rendah, belum berfungsinya lembaga agama/adat, lemahnya penegakan hukum bagian instrumen faktor munculnya konflik ini.

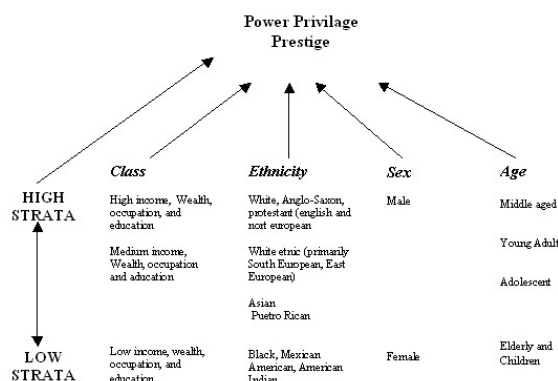
Konflik etnis biasanya bernuanasa konflik budaya, karena perbedaan budaya terletak pada masyarakat yang majemuk yang dijadikan dasar dalam pembagian kelompok etnis. Namun apakah yang berperan dari perbedaan kultural dalam menciptakan konflik etnis. Apakah dapat dikatakan bahwa semakin perbedaan kultural dan ekonomi yang ada dalam suatu kelompok masyarakat, maka akan semakin besar potensi konflik etnis yang akan timbul.

Kebudayaan bisa pula dimengerti sebagai totalitas tindakan komunikasi dan sistem-sistem makna. Posisi seseorang dalam kebudayaan akan ditentukan oleh 'kemelek-hurufan budaya' (cultural literacy), yaitu pengetahuan akan sistem-sistem makna dan kemampuannya untuk menegosiasikan sistem-sistem itu dalam berbagai konteks budaya¹².

Stratifikasi dan Konflik Sosial di Kalbar

Kajian stratifikasi sosial ini, secara khusus penulis menggunakan tulisan Vincent Jeffries and H. Edward Ransford yaitu *Social Stratification a multiple hierarchy approach* khususnya tentang *The Multiple Hierarchy Model* dan *The Ideology of Ethnic Stratification*. Beberapa pendekatan yang penulis pergunakan dalam tulisan ini adalah; *pertama*, model stratifikasi sosial yang ada di masyarakat yaitu model hirarki tunggal (*Single Hierarchy Model*) dan model

hirarki majemuk (*Multiple Hierarchy Model*)¹³. Model hirarki tunggal, terdapat dua asumsi, bahwa keluarga adalah unit yang tepat untuk mengadakan studi terhadap sistem stratifikasi sosial dan mengasumsikan bahwa semua ketidak samaan dalam masyarakat ditentukan faktor ekonomi. Sedangkan model hirarki majemuk (lihat bagan) bahwa stratifikasi sosial sebagai hasil interaksi sosial dari berbagai faktor seperti kelas, kesukuan, jenis kelamin dan usia, *kedua* pendekatan yang membagi tiga klasifikasi sosial yaitu *values, norms* dan *beliefs*¹⁴. Ketiga klasifikasi ini akan diuraikan secara makro beserta data-data pendukung yang penulis kumpulkan (lihat Figure 1-2).



Sumber : Figure 1-2. Multiple Hierarchy of Stratification

Konsep stratifikasi sosial dalam masyarakat dapat berupa stratifikasi kelas, etnik, jenis kelamin atau usia. Konsep kelas menunjuk pada stratifikasi sosial berdasarkan perbedaan pendapatan, posisi pekerjaan, tingkat pendidikan dan gaya hidup. Stratifikasi kelas ini, menurut Rossides mendeskripsikannya ke dalam lima struktur kelas; kelas atas, kelas menengah ke atas, kelas menengah ke bawah, kelas pekerja dan kelas bawah. Masing-masing struktur kelas mempunyai ciri-ciri identitas sosial; *kelas atas* bercirikan penghasilan besar

¹¹ Rochman Achwan, *Menuju Disintegrasi Bangsa atau Integrasi Baru ?*, makalah disampaikan pada Simposium tentang Permasalahan Integrasi dan Disintegrasi Bangsa, diselenggarakan oleh PPKB-LPUI, Depok 31 Maret 2001.

¹² Antariksa, *Budaya Sebagai Medan Pertarungan KUASA*, Newsletter KUNCI No. 11, Februari 2002

¹³ Vincent Jeffries and H. Edward Ransford, *Social Stratification a multiple hierarchy approach*, (Boston : Allyn and Bacon, Inc), 1980 hal. 3-12.

¹⁴ Vincent Jeffries and H. Edward Ransford, hal. 358-359.

dan kaya, punya otoritas menentukan kebijakan, latar belakang pendidikan yang tinggi, *kelas menengah atas* bercirikan mempunyai penghasilan yang tinggi, profesional, manager, mempunyai naluri bisnis tinggi dan berpendidikan universitas. *Kelas menengah ke bawah* adalah berpenghasilan rata-rata memiliki usaha dalam skala kecil dan tingkat pendidikan setingkat sekolah lanjutan, sedangkan bagi *kelas pekerja* pendapatan rendah dan bekerja semi terampil dan bagi *kelas bawah* pendapatan sangat kecil dan bekerja sebagai buruh yang tidak terampil yang riskan menjadi pengangguran.¹⁵

Sebagaimana yang kita maklumi bahwa Kalimantan Barat (Sampit dan Sambas) menjadi daerah tujuan migran Madura, dimana sejarah perpindahan orang Madura ke Kalimantan Barat sejak tahun 1902¹⁶ dan kebanyakan mereka berasal dari dua kabupaten bagian barat pulau Madura yaitu Bangkalan dan Sampang¹⁷. Kalimantan Barat menjadi daerah tujuan migrasi orang Madura karena pada saat itu kepadatan penduduknya rendah yaitu 17 jiwa per kilometer persegi (1980), sedangkan penduduk Madura sangat padat namun tidak diimbangi dengan sumber daya alam yang subur sehingga kondisi ini menjadi motivasi untuk bermigrasi di 'negeri' orang.

Migrasi orang Madura ke Kalimantan bagian dari pergumulan bertemunya antar suku yang sebelumnya telah hidup di Kalimantan seperti Melayu, Cina dan suku lainnya yang mengandung nilai-nilai

pluralitas yang tinggi. Berbagai orang dari agama, dan etnis serta kebudayaan yang berbeda menetap di daerah ini. Sungguh sebuah peradaban yang indah manakala perbedaan suku, agama dan budaya menjadi *spirit* utama membangun masyarakat, namun sejarah telah mencatat bahwa bumi Kalimantan Barat gagal membangun peradaban itu seiring dengan munculnya konflik antar etnis. Hal ini terbukti dengan seringnya terjadi konflik yang melibatkan etnik di Kalimantan Barat, diantaranya pada tahun 1967 yang melibatkan etnis Dayak dengan Tionghoa, tahun 1979, 1996/ 1997 antara etnis Dayak dengan Madura, kemudian tahun 1999 yang melibatkan etnis Melayu dan Dayak dengan etnis Madura. Kejadian-kejadian tersebut memakan korban yang tidak sedikit, baik nyawa manusia maupun harta benda. Hal itulah yang kemudian membuat Kalbar, terutama bagi masyarakat luar identik dengan konflik antar etnis¹⁸.

Prof. Dr. Syarif Ibrahim Alqadrie, M.Sc. berpendapat¹⁹ bahwa kekerasan dan konflik biasa pula ditimbulkan oleh faktor sosial budaya, seperti hilangnya dan terhambatnya pencarian identitas budaya. Di Kalbar fenomena identitas budaya yang paling menonjol adalah media identifikasi (*media of identification*) dan identifikasi etnis dan keagamaan (*ethno, religio identification*) yang menghasilkan kekerasan dan konflik antar anggota komunitas - Dayak dan Melayu dengan Madura yang telah terjadi 12 kali sejak 1963.

Pemahaman agama yang rendah akan memunculkan konflik sosial apalagi bila

¹⁵ Vincent Jeffries and H. Edward Ransford, hal 121.

¹⁶ Ada tiga tahap perpindahan orang Madura ke Kalimantan Barat, *pertama* periode perintisan (1902-1942), *kedua*, periode surut (1942-1950), *ketiga*, ini terjadi lantaran kehadiran Jepang dan revolusi kemerdekaan. *Ketiga*, setelah tahun 1950. (Sudagung, 2001 : *Mengurai Pertikaian Etnis ; Migrasi Swakarsa Etnis Madura ke Kalimantan Barat*, ISAI-Yayasan Adikarya Ikapi dan The Ford Foundation, Jakarta : hal. 76).

¹⁷ Ibid, hal. 50.

¹⁸Hardianti, *Pluralitas dan Hubungan Etnik di Kalimantan Barat*, dalam <http://www.mail-archive.com/mediacare@yahoogroups.com/msg27329.htm>

¹⁹ <http://www.kongresbud.budpar.go.id/46%20syarif%20brahim%20alqadrie.htm>

salah satu kelompok secara kuantitas “menguasai” kelompok lain serta watak masing-masing etnis secara egoisitis bahwa agama yang dipegang adalah paling benar (fanatisme beragama) dan “menyalahkan” agama lain apalagi bila ditiupkan isu-isu penyebaran agama terhadap orang yang telah beragama.

Sisi lain, hasil penelitian Al-Qadri (1999) memaparkan data bahwa etnik Melayu berkisar 47%, termasuk komunitas Dayak yang masuk Islam dan menyatakan diri sebagai Melayu, Dayak 37%, Tiongha 12%, Jawa 3%, Madura 3%, Bugis 2%, Sunda 1% dan sisanya 2% kelompok etnik lain. Sedangkan prosentase penduduk Sambas berdasarkan etnik adalah Melayu 47%, Dayak 28%, Cina 11%, Madura 9,4% dan sisanya 4,6% dari jumlah sekitar 791.937 jiwa pada tahun 1996 dan hampir 900.000 jiwa tahun 1999²⁰

Melihat data-data diatas maka kemungkinan terjadi “benturan budaya” serta persaingan untuk “menguasai” sangat besar sehingga rentan muncul benih konflik etnik, sebab kelompok mayoritas tentu akan tersugesti untuk menguasai dan mempertahankan kekuasaan atau institusi strategis lainnya. Dari sisi keberagaman etnik tentu sedikit banyak akan mempengaruhi komunikasi, *dan* timbulnya disharmoni antar etnik. Sebagaimana lazimnya masing-masing etnik akan senantiasa mempertahankan budaya dan norma-norma.

Demikian pula dari aspel agama, secara statistik (tabel;1 dan 2) masyarakat muslim di Kalimantan Barat lebih banyak dari agama lain meskipun mereka (muslim) tidak semuanya dari Madura artinya Islam sudah ada sebelum masyarakat Madura migrasi ke Kalimantan Barat. Masyarakat

Dayak mayoritas beragama Kristen – Katolik (namun sejak tahun 1986 masyarakat Dayak Halong mengenal agama Buddha Kaharingan, Buddha Belihan atau Buddha Dharma²¹) sedangkan orang Madura bergama Islam.

Tabel 1

Penduduk Kalimantan Barat menurut Agama

No	Agama	Jumlah Umat	Persentase
01	Islam	1.837.990	54,92
02	Kristen	321.181	9,60
03	Katolik	703.112	21,01
04	Hindu	8.678	0,26
05	Budha	213.382	6,37
06	Lain-lain	262.391	7,84
	Jumlah	3.346.734	100%

Sumber : Departemen Agama Prop. Kalimantan Barat : 1994

Tabel 2

Rumah Ibadah Menurut Jenis Agama Tahun 1994/1995

No. Kab/Kodya	ISLAM		KATOLIK			HINDU		BUDHA	
	Masjid	Surau	Gereja	Kopel	Pura	Sanggar	Vihara	Ceya	
01. Sambas	644	168	41	23	2	15	1	71	
02. Pontianak	761	498	138	221	3	36	11	-	
03. Sanggau	290	201	351	167	-	-	2	-	
04. Ketapang	247	219	25	139	4	70	3	-	
05. Sintang	268	263	137	15	1	10	2	-	
06. Kapuas	162	62	24	14	-	-	-	-	
07. Kod Pont	138	313	29	10	-	-	-	-	
JUMLAH	2.510	1.724	745	589	10	131	45	71	

Sumber : Kalimantan Barat Dalam Angka 1994, BPS.

Dalam konteks ini, posisi agama (pendidikan) bukan hanya masuk pada penjabaran ajaran formal dalam tataran ritual dan tradisi, karena dengan begitu pendidikan hanya merupakan upaya ideologisasi. Sebaliknya pendidikan hendaknya dipahami dalam sistem transendensi seluruh aspek kehidupan. Artinya trensendensi justru menghargainya dan bersama merumuskan kebutuhan manusia sebagai refleksi teologis masing-masing.

Pendidikan agama semestinya diarahkan untuk mengajak orang menerima dan terbuka terhadap pluralisme. Dengan begitu peserta didik diberikan kesempatan untuk mencerna "rasa keberagamaannya" dengan bahasanya sendiri dan menumbuhkan kesadaran keberagaman itu di tengah-tengah komunitas lain diluarnya. Disini peserta

²⁰ Kantor Bapeda Tk. I Kalbar, sebagaimana dikutip Al-Qadri (1999).

²¹ Sinar Dharma 09 Waisak 2549BE/ 2005, lihat di <http://www.mail-archive.com/mabindo@yahooogroups.com/msg00767.html>

pendidikan tidak dipaksa memahami pemahaman dan pengalaman lain dalam bahasa sang guru. Peserta pendidikan dilatih untuk menggunakan kepekaan atas pluralitas (perbedaan) dan memahaminya dengan bahasa batinnya sendiri.

Banyak kalangan menilai bahwa sumber konflik tidak lepas dari faktor karakter/ watak. Orang Madura sejak lama telah terstereotype pemalas, pendendam, egois dan stigma lain yang cenderung destruktif, meskipun image orang Madura yang cenderung destruktif ini dibantah oleh Antropolog asal Belanda, Dr Huub de Jonge dimana dia berpendapat bahwa anggapan tersebut terkadang hanya untuk kepentingan kelompok lain²². Mien Ahmad Rifai²³ secara utuh menjelaskan pembawaan orang Madura; Ėjhin (perseorangan), Gherrā (kaku dan kasar), Bāngalan (pemberani), Koko (kukuh), Sahuduna (apa adanya), Sacca (tukus setia), Jijib (tertib), Nongghāng (melecehkan), Ėbir (pamer), Pengko (keras kepala), Sanggāp (tanggap), Bilet (ulet), Junēl (berkewirausahaan), Lalampang (ketualangan), Parēmpen (hemat dan cermat), Sokkla (berkeagamaan), Ta'-karata'an (lantang).

Demikian halnya dengan citra Dayak yang dengan kuat masih dihubungkan dengan keterbelakangan atau istilah yang kita kenal dengan 'primitif', seperti pemburu kepala manusia, makan orang, dan memiliki ekor. Namun, citra negatif bahwa orang Dayak memiliki ekor terbantahkan. Hal itu dijelaskan oleh salah seorang narasumber penulis bahwa sebenarnya ekor tersebut adalah bagian dari cawat kulit kayu

yang digunakan oleh kaum laki-laki Dayak²⁴ (hal 263-4).

Menurut Prof. AB. Tangdililing bahwa munculnya stereotip disebabkan faktor budaya. Pandangan seorang atau kelompok masyarakat etnik menurut budayanya masing-masing akan menentukan stereotip etnik lainnya. Kalau ada budaya yang berbeda, maka pada saat itulah muncul *stereotype*²⁵ Penulis mencontohkan beberapa karakter negatif bagi terhadap suku Madura seperti masyarakat Dayak menganggap orang Madura kurang menghargai orang lain, keras kepala, dan kebiasaan berkelahi yang disebut *carok*; *ango'an potea tlang, e tembang pote mata*" (lebih baik putih tulang daripada putih mata), yang artinya lebih baik mati daripada menanggung malu. Padahal, bagi orang Madura konsep ini bagian dari *spirit* hidup dalam mencari kehidupan di Madura atau diluar Madura, sehingga akibat stigmasisasi yang salah kaprah ini, nuncul rasa buruk sangka dan pengkotakan komunikasi.

Tanpa bermaksud membela etnis manapun, secara prinsip watak/ pembawaan diatas melekat kepada tiap manusia (bersifat hakiki) dan kapan saja bisa terjadi. Demikian juga dalam hal kekerasan (pembunuhan) dimana orang Madura dikenal dengan *carok*²⁶, sedangkan masyarakat Dayak mengenal tradisi pengayauan yaitu adat memenggal kepala²⁷.

Lalu mengapa orang Madura ketika merantau kemudian menunai sukses secara materi? Mungkin pertanyaan ini sering

²² <http://www.antara.co.id/arc/2007/3/12/antropolog-belanda-anggapan-orang-madura-keras-tak-benar/>

²³ Mien Ahmad Rifai, *Manusia Madura*, Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya seperti Dicitrakan Peribahasannya, (Yogyakarta; Pilar Media), 2007; hal 199-235.

²⁴ Selengkapnya, baca Yekti Maunati, *Identitas Dayak*, Komodifikasi dan Politik Kebudayaan, (Yogyakarta; LKiS), Cet. I, 2004, hal 263-264)

²⁵ Edi Petebang dan Eri Sutrisno, *Konflik Etnik Sambas*, (ISA1; Jakarta, 2000), hal. 115

²⁶ Selengkapnya baca buku A. Latief Wiyata, *Carok* Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura, (Yogyakarta; LKiS), Cet. II, 2006.

²⁷ Edi Petebang dan Eri Sutrisno, *Konflik Etnik di Sambas*, (ISA1; Jakarta), 2000, hal 66.

muncul dikala orang membicarakan orang Madura yang hampir di bumi nusantara ataupun di berbagai negara. Abdurrahman berpendapat bahwa orang Madura mempunyai sifat-sifat pantang menyerah, ulet, percaya diri, sifat keras dan mempunyai solidaritas kelompok kuat. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh agama Islam²⁸ yang ada dalam al-Qur'an surat Ar-Ra'du (Guruh) ayat 11 bahwa "manusia tidak boleh putus asa. Manusia wajib berusaha atau berikhtiar memperbaiki nasibnya, karena Tuhan tidak akan mengubah nasib seseorang apabila orang itu tidak berusaha mengubahnya".²⁹

Katolik sebagai agama mayoritas bagi kelompok etnis Dayak di Kalimantan Barat juga mengajarkan penganutnya untuk mempertahankan tidak saja kelestarian hutan dan SDA lainnya tetapi juga identitas nilai budaya mereka. Ketika pembangunan yang berorientasi pada negara dan berdasarkan pada paradigma pertumbuhan ekonomi semata selama tiga dekade ditambah dengan lima tahun pada era reformasi menimbulkan proses deforestasi dan hilangnya identitas budaya kelompok etnis ini. Kondisi seperti ini menyebabkan mereka merasa sangat terluka dan terpinggirkan yang pada gilirannya memungkinkan timbulnya kekerasan dan konflik terhadap kelompok lain yang dianggap sebagai penyebab timbulnya proses tersebut.³⁰

Sifat rasa malu, yang dalam bahasa Madura disebut *todus*, adalah salah satu sifat orang Madura yang membuat mereka sanggup menjalani hidup menderita di

tanah perantauan.. Perasaan ini diungkap dalam semboyan "*Ango'an potea tlang, e tembang pote mata*" (lebih baik putih tulang daripada putih mata), yang artinya lebih baik mati daripada malu³¹. Oleh sebab itu karena didorong rasa malu bila gagal merantau, maka mereka berjuang dengan gigih dan tekun. Andalan utama mereka dalam perjuangan itu adalah kondisi badan mereka yang kuat dan "tahan cuaca". Kesanggupannya serta keikhlasannya untuk menderita, disertai sifat hemat dan kebiasaan menabung, lambat laun membuat perjuangan mereka membuahkan hasil.

Dari beberapa hasil penelitian bahwa mata pencaharian orang Dayak adalah bertani dengan sistem ladang berpindah. Ada pula diantara yang bekerja sebagai penoreh getah. Untuk memenuhi kebutuhan mereka akan makan daging, mereka beternak babi yang biasanya dilepas begitu saja seperti orang Melayu dan Jawa memelihara ayam. Orang Dayak juga terkenal sebagai pemburu binatang yang berani. Mereka biasanya menggunakan tombak, sumpit atau mandau.

Demikian juga orang Madura, sisi kinerja dan tenhik lebih baik dari warga Dayak, dalam mengerjakan lahan pertanian terlihat semi permanen (tidak berpindah-pindah), gotong royong dalam bertani lebih kuat, justru yang berbeda sama sekali adalah orang Madura lebih suka memelihara binatang sapi, apalagi babi yang diharamkan dalam hukum Islam.

Dalam sistem komunikasi, orang Madura sendiri hidup secara berkelompok dalam satu kawasan tertentu sehingga menciptakan klen eksklusif. Mereka mempunyai masjid sendiri, punya aturan-aturan sendiri sesuai dengan apa yang mereka pahami dari para kyai mereka. Kelompok ini terkesan agak sulit didekati

²⁸ Abdurrahman, : *Sekelumit Cara mengenal Masyarakat Madura*, Samsuri (ed). Madura. Proyek Penelitian Madura Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., (IKIP: Malang, 1977), hal. 12-13.

²⁹ Sudagung, Opcit, hal. 28.

³⁰

<http://www.kongresbud.budpar.go.id/46%20syarif%20ibrahim%20alqadrie.htm>

³¹ Sudagung, *Op.Cit*, hal. 119

oleh etnik lain termasuk kedua suku asli Kalimantan Barat yaitu Dayak dan Melayu, sehingga menciptakan jarak, bukan hanya secara fisik melainkan juga secara kultural dengan bagian masyarakat dan etnik lainnya di Kalimantan Barat.

Demikian juga orang Dayak, secara umum tidak begitu berbeda dengan sifat orang Madura, yaitu rasa kesukuan disertai solidaritas kelompok yang kuat. Disamping itu orang Madura juga mempunyai sifat cepat curiga dan pendendam, kendatipun mereka memiliki sifat yang baik yakni hemat dan suku menabung. Etnis Madura dikenal dengan ikatan kekerabatan yang sangat kuat, semisal orang Madura menganggap semua orang itu *taretan* (saudara) baik yang mempunyai ikatan keluarga atau tidak.³² Alhasil, secara prinsip banyak persamaan antara orang Madura

dan Dayak yang penting untuk dilestarikan.

Faktor pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir, tingkah laku dan sikap, sebab dengan pendidikan itu akan banyak pengetahuan dan keterampilan termasuk tentang kepribadian yang diperoleh, sehingga terbentuklah kepribadian yang kreatif, mandiri dan bertanggung jawab.

Demikian sebaliknya, dengan pendidikan yang rendah akan mengakibatkan pola pikir yang kurang kreatif, memandang hidup secara sempit dan cenderung fatalistis. Terobosan dibidang pendidikan penting setidaknya untuk menyadarkan mereka tentang makna hidup, minimal dalam konsep bermasyarakat terbangun mental progresif dan berwawasan luas. (bersambung). *Wa Allāh a'lam bi al-sawāb*□



³² A. Latif Wiyata, *Memahami Perilaku Budaya Orang Madura*, Kompas, 06 April 2001.

